

**SEKURITISASI EKOSISTEM GAMBUT
SUMATERA SELATAN OLEH NGO :
WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA
2014-2016**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional*



**Disusun Oleh
WAHYU SAPUTRA
07041281621095**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**SEKURITISASI EKOSISTEM GAMBUT SUMATERA
SELATAN OLEH NGO : WAHANA LINGKUNGAN
HIDUP INDONESIA 2014-2016**

SKRIPSI

Disusun Oleh
WAHYU SAPUTRA
07041281621095

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 17 Desember 2020
Pembimbing I

Hoirun Nisyak, S.Pd, M.Pd
NIP : 19780302 200212 2 002



Pembimbing II

Nur Aslamiah Supli, BIAM, M.Sc
NIP : 199012062019032017



Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D.
NIP. 196504271989031003

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**SEKURITISASI EKOSISTEM GAMBUT SUMATERA
SELATAN OLEH NGO : WAHANA LINGKUNGAN HIDUP
INDONESIA 2014-2016**

SKRIPSI

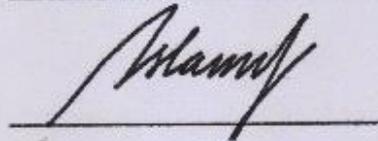
**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 30 Desember 2020
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat**

TIM PENGUJI SKRIPSI

Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd.
Ketua



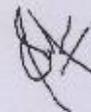
Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc.
Anggota



Muchammad Yustian Yusa, S.S., M.Si.
Anggota



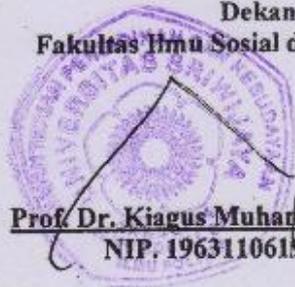
Ferdiansvah Rivai, S.IP., MA
Anggota



Indralaya, 1 Februari 2021

Mengesahkan,
Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si.
NIP. 196311061990031001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WAHYU SAPUTRA

NIM : 07041281621095

Program Studi : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "Sekritisasi Ekosistem Gambut oleh NGO : Studi Kasus Wahana Lingkungan Hidup Indonesia 2014-2016." ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak mana pun.

Indralaya, 17 Desember 2020

Yang membuat pernyataan



6000
RUPIAH

Wahyu Saputra

07041281621095

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk keberlangsungan Lingkungan Hidup dengan semua yang hidup bersamanya.

“ Di balik dinginnya gambut, hangatlah sebuah peradaban “

KATA PENGANTAR

Dengan selesainya penelitian skripsi ini, maka tunailah tugas untuk mengemban studi Ilmu Hubungan Internasional di kampus Sriwijaya tercinta. Pertama dan yang paling utama, peneliti memanjatkan puji dan syukur tak terhingga Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya peneliti mampu menyelesaikan penelitian skripsi dan menyelesaikan pendidikan dengan sebaik-baiknya. Salam hormat penuh kasih peneliti sampaikan kepada kedua orang tua Bapak **Turmuzi Fikri** dan Ibu **Liliana** yang telah mengorbankan jiwa dan raga agar anak-anaknya agar sukses di masa depan dengan segala keterbatasan dan kekurangan hidup yang selalu kita syukuri, semoga ini adalah awal terangkatnya derajat hidup keluarga menjadi lebih baik. Salam kasih juga peneliti sampaikan kepada kedua adinda **Devi Oktavianti** dan **Triya Julischa Azhara** yang selalu menemani orang tua di rumah menjalani hari-hari terbaik tanpa seorang anak lelaki yang tak kunjung pulang. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan alasan peneliti berjuang dan menjalani setiap proses hidup sampai detik ini.

Salam hormat dan terima kasih kepada Ibu **Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd.** selaku dosen pembimbing 1 dan Ibu **Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc.** selaku dosen pembimbing 2 Skripsi ini yang telah memberikan waktu berharga untuk membimbing, mengarahkan, memotivasi dan masukan dalam proses menyelesaikan penelitian ini. Peneliti juga sampaikan salam hormat dan terima kasih kepada dosen penguji Bapak **Ferdiansyah R. S.IP., M.A.** dan Bapak **Muchammad Yustian Yusa, S.S., M.Si.** yang telah berkenan arif dan bijaksana memberikan kritik dan masukan serta penilaian terhadap penelitian skripsi ini. Peneliti ucapkan terima kasih kepada Kak **Dimas Robi** dan Mbak **Sisca Ari Budi** yang dengan tulus telah banyak membantu dalam mempersiapkan segala keperluan administrasi.

Salam hormat penuh kasih untuk Bang **Abdul Halim, S.IP., M.A** atas segala yang diberikan selayaknya kasih kepada adiknya. Pertemuan singkat malam itu telah memberikan banyak perubahan dalam hidup kita dan kenangan akan mencatat abang adalah salah satu orang yang paling berpengaruh dalam hidup. Teruntuk para sahabat peneliti **Kurniawan Mardiansyah, S.Sos.** kemudian **Muhammad Hafidh, S.Sos.** kemudian **Kenken Gheovano Harahap, S.Sos.** kemudian **Ilham Bintang S.Sos.** dan **Yuschal Ilham Hairul, S.Sos.** yang sudah sabar dan ikhlas menemani perjalanan hidup, berbagi segala hal bersama selama 5 tahun ini tanpa henti dan sampai detik ini. Waktu memang akan menjauhkan, tetapi tidak akan memisahkan kita.

Salam hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh keluarga besar **Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Selatan** tanpa terkecuali yang sudah memberikan kepercayaan, kesempatan, ilmu dan pengalaman yang berharga selama 2 tahun ini. Terkhusus untuk Kak **Wahyu Pradana** dan Kak **M. Hairul Sobri (Eep)** yang sudah banyak membantu peneliti dalam penyelesaian skripsi ini sebagai informan. Semoga perjuangan mewujudkan keadilan ekologis dan lingkungan hidup yang adil dan lestari akan menemui titik terbaiknya.

Salam hormat dan terima kasih kepada seluruh keluarga besar **Civitas Akademika Ilmu Hubungan Internasional** yang telah menjadi tempat bernaung dalam proses hidup sampai akhir ini, terkhusus kepada para rekan-rekan di Angkatan 2016 atas kebaikan selama ini baik yang sering maupun yang jarang bertemu sehari-hari dan belum bisa disebutkan satu persatu. Terakhir salam hormat dan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang saling mengenal selama menyelesaikan studi atas kebaikan selama ini dan belum bisa disebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dari skripsi ini, maka dari itu sangat diharapkan kritik dan saran yang membangun guna berkembangnya keilmuan peneliti. Selain itu tidak lupa kata maaf disampaikan apabila dalam penyelesaian skripsi ini maupun selama menyelesaikan studi terdapat banyak kesalahan maupun kekhilafan.

Indralaya, 12 April 2021

Wahyu Saputra

INTISARI

Ekosistem gambut merupakan ekosistem unik yang mampu mengatur dan mengendalikan pemanasan global, terlebih Indonesia berperan penting dengan luasan ekosistem gambut terbesar ke 4 di dunia. Akan tetapi dalam perjalanannya, terjadi degradasi ekosistem gambut di Indonesia yang disebabkan oleh alih fungsi lahan menjadi perusahaan perkebunan yang menyebabkan bencana ekologis seperti kebakaran hutan dan lahan serta banjir. Secara tidak langsung menyebabkan naiknya gas karbon yang mempercepat pemanasan global. Sumatera Selatan menjadi sorotan dengan melihat fakta menjadi sumber kebakaran hutan dan lahan gambut terbesar semenjak 2014 sampai 2015 dan tingkat kerusakan yang tinggi. Kondisi inilah yang menjadi perhatian NGO yaitu Wahana Lingkungan Hidup Indonesia untuk mewujudkan perlindungan dan pelestarian ekosistem gambut di Sumatera Selatan. Penelitian ini akan menganalisis tentang perlindungan dan pelestarian ekosistem gambut di Sumatera Selatan yang dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia melalui upaya sekuritisasi. Dalam menganalisis upaya sekuritisasi tersebut, peneliti akan melihat aktor sekuritisasi, *speech act* yang dibangun, ancaman dimasa depan, *target audience*, tindakan darurat yang dilakukan dan hasil dari sekuritisasi berupa kebijakan atau keputusan politik. Selain itu penelitian ini akan dibatasi sepanjang 2014-2016 dengan melihat bencana ekologis yang terjadi dan awal kemunculan isu ekosistem gambut menjadi perhatian publik.

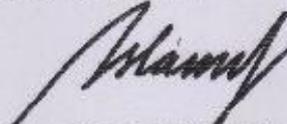
Kata Kunci : Sekuritisasi, Ekosistem Gambut, Sumatera Selatan, WALHI

Dosen Pembimbing 1



Hoiron Nisyak, S.Pd., M.Pd
NIP. 196504271989031003

Dosen Pembimbing 2



Nur Astamiah Supli, D.IAM., M.Sc
NIP. 199012062019032017

Ketua Jurusan

Ilmu Hubungan Internasional

FISIP-UNSRI



Azhar, SH., M.Sc., L.L.M, L.LD
NIP. 196504271989031003

ABSTRACT

The peat ecosystem is a unique ecosystem that is able to regulate and control global warming, especially since Indonesia plays an important role with the 4th largest peat ecosystem in the world. However, along the way, there has been degradation of the peat ecosystem in Indonesia due to the conversion of land use to plantation companies which has caused ecological disasters such as forest and land fires and flooding. Indirectly causes an increase in carbon gas which accelerates global warming. South Sumatra is in the spotlight by looking at the fact that it was the largest source of forest and peatland fires from 2014 to 2015 and a high level of damage. This condition is of concern to the NGO, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, to realize the protection and preservation of the peat ecosystem in South Sumatra. This research will analyze the protection and preservation of the peatland ecosystem in South Sumatra carried out by Wahana Lingkungan Hidup Indonesia through securitization efforts. In analyzing these securitization efforts, the author will look at securitization actors, built speech act, future threat, target audience, extraordinary measure and the results of securitization in the form of policies or political decisions. In addition, this research will be limited throughout 2014-2016 by looking at the ecological disasters that occurred and the emergence of the issue of the peat ecosystem to the public's attention.

Keywords : Securitization, Peat Ecosystem, South Sumatra, WALHI

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	6
1.3.Tujuan Penelitian	6
1.3.1.Tujuan Penelitian Objektif.....	6
1.3.2.Tujuan Penelitian Subjektif.....	6
1.4.Manfaat Penelitian	6
1.4.1.Manfaat Penelitian Teoritis.....	6
1.4.2.Manfaat Penelitian Praktis	7
1.5.Kajian Pustaka.....	7
1.6.Landasan Konseptual	11
1.6.1.Kerangka Teori dan Konsep	11
a. Teori Sekuritisasi	11
b. Konsep <i>Non Government Organization</i> (NGO)	15
1.6.2.Alur Pemikiran.....	19
1.7.Argumentasi Utama	19
1.8.Metode Penelitian.....	19
1.8.1.Desain Penelitian	19
1.8.2.Definisi Konsep	20
1.8.3.Fokus Penelitian.....	21

1.8.4. Unit Analisis	22
1.8.5. Jenis dan Sumber Data	22
1.8.6. Teknik Pengumpulan Data	22
1.8.7. Teknik Penentuan Informan	23
1.8.8. Teknik Keabsahan Data	23
1.8.9. Teknik Analisis Data	24
BAB II GAMBARAN UMUM	25
2.1. Definisi Gambut	25
2.2. Kebijakan Internasional terkait gambut : Konvensi Ramsar 1975	27
2.3. Persebaran Gambut di Dunia	30
2.4. Persebaran Gambut di Indonesia	31
2.5. Peran Gambut bagi Lingkungan dan Kehidupan	34
BAB III PEMBAHASAN	36
3.1. Aktor Sekuritisasi	37
3.2. Speech Act oleh Aktor Sekuritisasi	40
3.3. Existential Threat	46
3.4. Target Audience	47
3.5. Extraordinary Measure	49
3.5.1. Dorongan adanya Kebijakan	50
3.5.2. Mendorong adanya Penegakan Hukum	53
3.5.3. Melibatkan Masyarakat dalam Pengelolaan Ekosistem Gambut	59
3.6. Hasil Sekuritisasi	61
BAB IV PENUTUP	69
4.1. Kesimpulan	69
4.2. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Kajian Pustaka	10
Tabel 1.2. Fokus Penelitian	21
Tabel 2.1. Luasan Gambut 10 Terbesar di Dunia.....	30
Tabel 2.2. Negara dengan Stok Karbon 10 Terbesar di Dunia.....	31
Tabel 2.3. Luasan Gambut di Indonesia Tahun 2011	32
Tabel 2.4. Luasan Gambut di Indonesia Tahun 2018.....	32
Tabel 3.1. <i>Speech Act</i> Isu Gambut di Sumatera Selatan.....	42
Tabel 3.2. Status Kerusakan Ekosistem Gambut di Sumatera Selatan.....	47
Tabel 3.3. <i>Extraordinary Measure</i> Sepanjang Tahun 2014-2016.....	49
Tabel 3.4. Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Surat Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 24/PDT.G/2015/PN.PLG.....	56
Gambar 3.2 Surat Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG.....	57
Gambar 3.3 Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2015.....	64
Gambar 3.4 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016.....	65
Gambar 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016.....	68

DAFTAR SINGKATAN

CI	= Conservation International
COP	= Contracting of Parties
EDF	= Environmental Defence Fund
FoEI	= Friends of The Earth International
GtC	= Gigaton Carbon
IUCN	= Internasional Union for Concervation of Nature
NGO	= Non Governmental Organization
PBB	= Perserikatan Bangsa-Bangsa
UNCED	= United Nations Convergence on Environment and Development
UNFCCC	= United Nations Framework Convention on Climate Change
WALHI	= Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Degradasi lingkungan yang terjadi membuat negara mulai menjadikan isu lingkungan hidup sebagai kajian internasional dan dibahas dalam berbagai forum internasional yang ditandai dengan konferensi lingkungan hidup di Stockholm tahun 1972 (Barry Buzan, 1998). Munculnya isu lingkungan membuat negara mulai memikirkan dan terlibat dalam berbagai kerja sama internasional yang lebih besar (Sorensen, 2009). Puncaknya isu lingkungan menjadi lebih menonjol secara politik setelah diadakannya Konferensi PBB tahun 1992 tentang lingkungan dan pembangunan (UNCED). Salah satu isu hangat yang menjadi perbincangan dalam isu lingkungan internasional adalah isu pemanasan global karena dianggap sebagai ancaman serius bagi kelangsungan spesies dan ekosistem di seluruh dunia (Hulme, 2005). Data menunjukkan dalam rentan waktu sejak 1980 yang dimulai kemunculan revolusi industri jumlah gas karbon dioksida sebesar 1 GtC di tahun 2018 kini mencapai 37,1 GtC dan menaikkan jumlah suhu bumi sebesar 1,5% (Quere, Hawtin, & Vuuren, 2018). Diperkirakan pada tahun 2100 temperatur atmosfer akan mencapai kenaikan 1,5-4,5° Celsius yang mengakibatkan punahnya berbagai jenis keanekaragaman hayati, kenaikan permukaan air laut sekitar 15-95 cm dan banjir yang luas akibat mencairnya es dan gletser kutub, meningkatkan intensitas dan frekuensi hujan badai dan angin topan, kekeringan berkepanjangan yang menyebabkan kebakaran hutan serta berbagai penyakit akibat perubahan iklim secara drastis (Sayyidati, 2016).

Dalam pengendalian pemanasan global, terdapat sebuah ekosistem yang mampu menyerap dan mengatur emisi karbon di dunia sehingga perlu dilakukan pengelolaan secara adaptif yang disebut sebagai ekosistem gambut. Dengan luasan yang hanya sebesar 3%

daratan di dunia ternyata mampu menyerap dan menyimpan 550 GtC atau 30% karbon di dunia (Gambut, 2020). Para ilmuwan menyatakan sejak lama bahwa ekosistem gambut merupakan bagian penting dari siklus karbon di dunia. Iklim akan menjadi dingin saat gas karbon dioksida yang berada di atmosfer terserap dari ekosistem gambut (Hugelius, 2020). Dalam kondisi alami, ekosistem gambut yang terjaga dapat meningkatkan kemampuannya dalam menyerap karbon, namun jika terganggu maka dapat menjadi sumber meningkatnya karbon, bahkan menjadi sumber dari metana dan dinitrogen oksida (Murdiyarto & Suryadiputra, 2001). Saat ini luasan gambut di dunia adalah sebesar 170 Juta Hektar dengan sebaran di 168 Negara. Brazil menempati peringkat pertama dengan 31 Juta Hektar, diikuti Indonesia sebesar 22,4 Juta Hektar dan Republik Congo sebesar 11,5 Juta Hektar (Cifor, 2020). Indonesia sendiri memiliki kawasan ekosistem gambut terbesar kedua di dunia dengan luasan 22,4 juta hektar yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, dan Papua yang mampu menyimpan sekitar 57 GtC gas karbon dioksida sumber pemanasan global. Secara umum, ekosistem gambut Indonesia memiliki fungsi dan manfaat antara lain sebagai penyerap karbon, sebagai penyangga dan tata kelola air, sebagai habitat flora dan fauna, dan sumber mata pencaharian masyarakat di sekitar ekosistem gambut (Ramdhan, 2017). Dengan melihat peran penting dan manfaat yang diberikan, sudah seharusnya ekosistem gambut dilindungi dan dijaga kelestariannya.

Namun, fakta yang ditemukan adalah terjadinya degradasi ekosistem gambut yang ada di Indonesia. Hal ini diakibatkan oleh kekeliruan dan ketimpangan dalam pengelolaan ekosistem gambut yang dilakukan oleh negara (Ramdhan, 2017). Kawasan ekosistem gambut kemudian beralih fungsi menjadi kawasan perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri yang berkembang secara masif. Data menunjukkan dalam rentang tahun 2005-2015 terdapat 6,3 juta hektar lahan gambut yang sudah memiliki izin usaha dan beralih fungsi menjadi kawasan perkebunan, dengan 4,5 juta di antaranya menjadi perkebunan hutan

tanaman industri dan sisanya menjadi perkebunan sawit (Triyono & Vebri, 2015). Dampaknya, kawasan ekosistem gambut menjadi rusak akibat pembukaan sekat kanal oleh perusahaan sehingga gambut akan menjadi kering, padahal karakteristik gambut adalah lahan basah dan menjadi sumber kebakaran hutan.

Puncaknya, kebakaran hutan dan Lahan 2015 menjadi cerminan betapa lemahnya komitmen terhadap perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut di Indonesia. Data menunjukkan luas kebakaran hutan dan lahan 2015 mencapai 2,61 Juta hektar yang tersebar di 31 Provinsi yang tersebar di Sumatera selatan yaitu 646.298,80 Ha, disusul Kalimantan Tengah 583.833,44 Ha dan Papua 350.005,30 Ha (Sipongi, 2020). Guido Van der Werf, seorang peneliti dari Fakultas Ilmu Bumi Universitas Vrije Amsterdam, mengungkapkan dampak dari kebakaran hutan dan lahan 2015 di Indonesia telah melepaskan 1 miliar ton gas karbon dioksida ke udara, lebih besar dari pengeluaran emisi tahunan Jerman. Pandangan serupa juga disampaikan I Nyoman Suryadiputra, pegiat lingkungan dari Wetlands International yang mengungkapkan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia 2015 merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia, dan diperkirakan terus berlangsung sampai 2016 (Linggasari, 2015). Bencana lingkungan hidup ini berdampak pada berbagai sektor mulai dari sektor ekonomi, kesehatan, sosial dan keamanan negara. Indonesia mengalami kerugian negara mencapai 16 miliar USD, krisis kesehatan melanda masyarakat yang terjangkit gangguan pernafasan, mata dan kulit, aktivitas masyarakat di semua sektor yang terganggu bahkan berhenti akibat kurangnya jarak pandang yang menjatuhkan perekonomian masyarakat miskin, bahkan sekitar 5 juta siswa kehilangan waktu belajar akibat penutupan sekolah. (World Bank Group, 2015).

Sumatera Selatan menjadi perhatian karena menyumbang asap terbesar dengan luasan kebakaran hutan dan lahan 646.298,80 Ha. Dengan luasan ekosistem gambut kurang lebih 2 juta hektar, fakta menunjukkan Sumatera Selatan menjadi provinsi yang mengalami

kerusakan ekosistem gambut paling besar mencapai 98 % (KLHK, 2018). Hadi Jatmiko, Direktur Eksekutif WALHI Daerah Sumatera Selatan 2014-2018, mengungkapkan terjadinya kerusakan ekosistem gambut yang berdampak pada kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan diakibatkan oleh adanya perusahaan perkebunan kelapa sawit dan perkebunan hutan tanaman industri. Hal ini dibuktikan dengan adanya 63 perusahaan yang mengalami kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut yang mencapai 4416 titik api (Nugraha, 2015). Catatan WALHI menunjukkan pemberian izin usaha perusahaan di kawasan gambut sudah berlangsung secara masif sejak 1997. Contohnya, luasan perkebunan kelapa sawit yang awalnya 50.120 Ha ditahun 1994, meningkat tajam menjadi 827.812 Ha di tahun 2015, dan izin usaha untuk perkebunan hutan tanaman industri mencapai 1,8 juta Ha (Utomo, 2015).

Melihat kondisi ini, maka perlu adanya upaya politik yang lebih ekstrem yang disebut sebagai sekuritisasi berkaca pada pentingnya ekosistem gambut bagi pemanasan global, penyangga tata kelola air, dan kesejahteraan masyarakat. Di samping tata kelola lahan keliru yang dilakukan oleh negara dengan sembarangan memberikan izin kepada korporasi mengelola lahan gambut memberikan dampak buruk dan sumber bencana apabila ekosistem gambut mengalami kerusakan dan terancam kelestariannya. Sekuritisasi dilakukan sebagai upaya mengangkat isu tertentu sebagai isu keamanan karena sebelumnya tidak menjadi perhatian serius negara meskipun sudah lama jadi pembahasan para peneliti. Aktor sekuritisasi tidak hanya berfokus pada negara atau pemerintahan daerah, tetapi juga dapat dilakukan oleh siapa pun termasuk NGO. Sepak terjang NGO tersebut menjadi patokan seberapa layaknya mereka mengambil posisi sebagai aktor dalam sekuritisasi. Posisi sebagai aktor sekuritisasi kemudian diambil oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) sebagai organisasi lingkungan tertua dan terbesar di Indonesia (WALHI, 2020). WALHI sebagai bagian dari jejaring NGO Internasional yaitu Friend of The Earth International

melihat bahwa persoalan lingkungan hidup secara global harus diatasi dengan cara menjadi inisiator yang lambat mengubah paradigma publik, media, dan pemangku kebijakan untuk mulai memikirkan keberlangsungan dan pelestarian lingkungan dengan skala besar dengan kebijakan-kebijakan strategis melalui berbagai analisis dan bukan hanya memikirkan keuntungan politis maupun ekonomi semata (Friend of the Earth, 2020). WALHI hadir menjadi pionir terdepan mengadvokasikan berbagai kebijakan negara terkait pengelolaan lingkungan dan agraria sebagai langkah mengubah paradigma berpikir yang mengedepankan keadilan ekologis dan berbasis kajian serta berkeadilan gender (WALHI, 2020). Dalam pandangan WALHI, ekosistem gambut mempunyai peran ganda jika dimanfaatkan dengan bijaksana, maka akan menjadi pengatur dan pengendali pemanasan global, penyangga tata kelola air dan mencegah kebakaran hutan dan lahan karena memiliki kandungan air yang banyak, sebaliknya jika lahan gambut mengalami kerusakan maka dampaknya adalah sebagai sumber kebakaran hutan yang mengakibatkan tingginya gas karbon sehingga memperbesar emisi karbon yang berdampak pada pemanasan global (Sobri, 2020).

Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana upaya sekuritisasi ekosistem gambut di Sumatera Selatan yang dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia sebagai aktor sekuritisasi dengan melihat berbagai ketimpangan pengelolaan, kerusakan dan dampak buruk yang dirasakan akibat rusaknya ekosistem gambut di Sumatera Selatan. Penelitian ini berfokus pada rentang tahun 2014-2016 dengan melihat bencana besar yang terjadi akibat rusaknya ekosistem gambut dan awal kemunculan isu ekosistem gambut menjadi perhatian publik. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan inilah, yang menjadi alasan peneliti mengangkat judul **“Sekuritisasi Ekosistem Gambut Sumatera Selatan oleh NGO : Wahana Lingkungan Hidup Indonesia 2014-2016 “**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu “ **Bagaimana sekuritisasi ekosistem gambut di Sumatera Selatan yang dilakukan NGO : Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dalam rentang tahun 2014-2016** “

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian Objektif

- a. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan sekuritisasi ekosistem gambut di Sumatera Selatan yang dilakukan oleh NGO : Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dalam rentang tahun 2014-2016.

1.3.2. Tujuan Penelitian Subjektif

- a. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.
- b. Untuk memperluas pemahaman teori dan aplikasinya dalam kajian hubungan internasional.
- c. Untuk menerapkan ilmu yang sudah diperoleh, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kontribusi terhadap perlindungan lingkungan hidup.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Penelitian Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi gambaran tentang bagaimana isu ekosistem gambut menjadi kajian keamanan nasional maupun internasional salah satunya

melalui sekuritisasi ekosistem gambut Sumatera Selatan yang dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.

1.4.2. Manfaat Penelitian Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi dorongan kepedulian pemerintah dan masyarakat luas terhadap perlindungan lingkungan hidup terutama ekosistem gambut khususnya di Sumatera Selatan dan di Indonesia pada umumnya.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan observasi untuk penelitian selanjutnya ataupun penelitian serupa.

1.5. Kajian Pustaka

Pertama untuk memahami teori sekuritisasi dan kaitannya dalam isu lingkungan, peneliti mengacu pada buku yang ditulis oleh Barry Buzan bersama Ole Waever dan Jap De Wilde dengan judul *Security a New Framework For Analysis*. Dalam buku ini dijelaskan bahwa isu keamanan tidak hanya berpatokan pada sektor militer yang berkaitan dengan strategi perang, persenjataan, rudal dan lain-lain, namun telah masuk ke bagian politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Buzan dan kawan-kawan menawarkan pemikiran dan pendekatan baru dalam memandang isu keamanan. Sebagai perbandingan, pada awal buku ini dijelaskan terlebih dahulu mengenai konsep isu keamanan tradisional yang berfokus pada sektor militer dan negara sebagai aktor utama, kemudian di gabungkan dengan isu keamanan non tradisional yang mencakup berbagai level analisis, berbagai sektor yaitu politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan dan negara bukanlah satu-satunya aktor utama melainkan dari berbagai aktor seperti organisasi internasional, NGO, pemangku kepentingan dan pemangku penekan (perusahaan, partai politik, individu dan lainnya). Peneliti menggunakan

buku ini sebagai landasan dalam memahami teori sekuritisasi, dasar-dasar konsep sekuritisasi, dan sektor-sektor penting dalam sekuritisasi.

Selanjutnya, dalam memahami konsep NGO secara umum dan NGO lingkungan, peneliti bersandar pada buku yang ditulis oleh Scoot T. Young dan K. Kathy Dhanda dengan judul *Sustainability : Essentials for Business*. Buku ini menjelaskan tentang definisi dan konsep bisnis berkelanjutan, hubungan dengan gerakan hijau, urbanisasi, laba dan daya saing. Kemudian definisi dan konsep bisnis berkelanjutan dikaitkan dengan berbagai permasalahan seperti masalah udara dan iklim, masalah air, pertanian, degradasi hutan, /keanekaragaman hayati dan energi bersih alternatif. Buku ini dalam bagian selanjutnya menjelaskan juga pentingnya peran pemangku kepentingan dalam membangun strategi berkelanjutan dan solusi berbagai permasalahan yang ada. Kemudian, penjelasan tentang definisi NGO khususnya NGO lingkungan diperlukan sebagai aktor pemangku kepentingan bersama dengan pemerintah dan perusahaan. Bagian terakhir menjelaskan tentang strategi masa depan terkait dengan bisnis berkelanjutan. Peneliti bersandar pada buku ini dalam menjelaskan definisi NGO secara umum dan definisi NGO Lingkungan, kategori NGO lingkungan, peran NGO lingkungan dan prinsip yang dipegang NGO lingkungan dalam agenda lingkungan sampai saat ini.

Selanjutnya dalam memahami secara rinci teori sekuritisasi dan menjelaskan indikator atau proses dalam sekuritisasi, peneliti mengacu pada jurnal yang di tulis oleh Sezer Özcan dengan judul *Securitization of Energy Through the lenses of Copenhagen School*. Penelitian ini secara rinci menjelaskan secara rinci mengenai evolusi studi keamanan dan arti keamanan secara umum, dan hubungan energi dalam teori sekuritisasi yang diangkat. Penelitian ini juga menjelaskan sekuritisasi sebagai definisi baru dalam keamanan yang muncul setelah perang dingin dan meluas ke berbagai isu. Fokus penelitian ini adalah menjelaskan pendekatan *Copenhagen School* dalam analisis isu energi khususnya minyak

dan gas. Penelitian ini menjelaskan bagaimana isu energi berpindah menjadi isu keamanan melalui sebuah sekuritisasi. Penelitian ini menjadi acuan peneliti dalam membedah indikator dan proses sekuritisasi yang akan menjadi pisau analisis peneliti dalam sekuritisasi ekosistem gambut yang dilakukan oleh NGO. Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian ini terletak pada isu yang diangkat antara energi dan lingkungan dan cakupan dimensi yang diangkat.

Selanjutnya dalam melihat sekuritisasi dalam isu lingkungan, peneliti mengacu pada penelitian yang di tulis oleh Kristina Tabackova dengan judul *Securitization of Environmental issues*. Penelitian ini menjelaskan tentang masalah-masalah lingkungan dalam pandangan studi keamanan. Penelitian ini dimulai dengan menjelaskan sejarah dan evolusi studi keamanan, kemudian fokus pada munculnya *Copenhagen School* dan teori Sekuritisasi serta Sekuritisasi sektor lingkungan. Bagian utama dari penelitian ini adalah fokus masalah-masalah lingkungan khususnya perubahan iklim, migrasi dan erosi air dan tanah yang dianggap dapat menimbulkan potensi konflik. Bagian akhir penelitian ini menjelaskan sekuritisasi sebagai langkah dalam mengatasi masalah lingkungan sehingga dapat disimpulkan bahwa masalah lingkungan menjadi salah satu isu yang relevan saat ini menjadi bagian dari studi keamanan. Penelitian ini menjadi acuan peneliti dalam memandang lingkungan sebagai salah satu isu keamanan global yang sangat penting dan sekuritisasi lingkungan menjadi proses dalam usaha penyelamatan lingkungan. Perbedaan mendasar penelitian peneliti dengan penelitian ini adalah spesifikasi fokus bahasan yang diangkat yaitu peneliti berfokus pada sekuritisasi lingkungan terutama ekosistem gambut skala daerah yang dilakukan oleh NGO sedangkan penelitian sebelumnya menjelaskan secara global.

Terakhir adalah jurnal yang ditulis oleh Kardina Gultom dengan judul *Sekuritisasi Kabut Asap di Singapura 1997-2014*. Penelitian ini menjelaskan bagaimana alur sekuritisasi

kabut asap yang dilakukan oleh Pemerintah Singapura pada tahun 1997-2014. Dalam jurnal ini dijelaskan keberhasilan Singapura dalam upaya sekuritisasi kabut asap dengan mengirimkan nota protes ke Indonesia sebagai produsen kabut asap, kerja sama Singapura – Indonesia dalam menanggulangi kabut asap, ratifikasi *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP)* dan peresmian *Transboundary Haze Pollution Act*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah teori yang digunakan yaitu teori sekuritisasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah aktor yang mengangkat isu sebagai isu keamanan serta proses sekuritisasi yang dilakukan.

Tabel 1.1 Kajian Pustaka

No	Penelitian Terdahulu	Keterangan
1	Nama Penulis	Barry Buzan bersama Ole Waever dan Jap De Wilde
	Judul	<i>Security a New Framework for Analysis</i>
	Jenis Penelitian	Buku terbitan Lynne Rienner Publishers, Inc.
	Tahun	1998
	Hasil	Menjelaskan tentang definisi isu keamanan non tradisional, munculnya <i>Copenhagen school</i> dan teori sekuritisasi.
	Perbandingan	-
2.	Nama Penulis	Scot T. Young dan K. Kathy Dhanda
	Judul	<i>Sustainability : Essentials for Business</i>
	Jenis Penelitian	Buku terbitan SAGE Publications, Inc.
	Tahun	2013
	Hasil	Menjelaskan tentang definisi NGO khususnya NGO lingkungan, menjelaskan kategori, peran serta prinsip agenda sampai saat ini.
	Perbandingan	-
3	Nama Penulis	Sezer Özcan
	Judul	<i>Securitization of Energy Through the lenses of Copenhagen School</i>
	Jenis Penelitian	Prosiding Konferensi Akademik Internasional WEI Orlando West East Institute
	Tahun	2013
	Hasil	Menjelaskan pendekatan <i>Copenhagen School</i> dalam analisis isu energi khususnya minyak dan gas. Penelitian ini menjelaskan bagaimana isu energi berpindah menjadi isu keamanan melalui sebuah sekuritisasi.

	Perbandingan	Perbedaannya terletak pada isu yang diangkat antara energi dan lingkungan dan cakupan dimensi yang diangkat.
4	Nama Penulis	Kristina Tabackova
	Judul	<i>Securitization of Environmental issues</i>
	Jenis Penelitian	Tesis S2 Fakultas Studi Sosial Universitas Masaryk Republik Ceko
	Tahun	2011
	Hasil	Menjelaskan tentang Menjelaskan sejarah dan evolusi studi keamanan, kemunculan pemikir <i>Copenhagen School</i> , teori Sekuritisasi, sekuritisasi sektor lingkungan. Menjelaskan tentang sekuritisasi perubahan iklim, migrasi dan erosi air dan tanah yang dianggap dapat menimbulkan potensi konflik.
	Perbandingan	Persamaannya terletak pada teori yang digunakan yaitu sekuritisasi dan tema lingkungan dalam sekuritisasi dan perbedaannya terletak pada aktor sekuritisasi, isu lingkungan yang diangkat dalam proses sekuritisasi.
5	Nama Penulis	Kardina Gultom
	Judul	<i>Sekuritisasi Kabut Asap di Singapura 1997-2014</i>
	Jenis Penelitian	Jurnal Indonesian Perspective, Vol. 1, No. 2 (Juli-Desember 2016): 49-66
	Tahun	2016
	Hasil	Keberhasilan Singapura dalam upaya sekuritisasi kabut asap dalam tahun 1997-2014 dengan mengirimkan nota protes ke Indonesia sebagai produsen kabut asap, kerja sama Singapura – Indonesia dalam menanggulangi kabut asap, ratifikasi <i>ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP)</i> dan peresmian <i>Transboundary Haze Pollution Act</i> .
	Perbandingan	Persamaannya terletak pada teori yang digunakan yaitu teori sekuritisasi dan perbedaannya terletak pada aktor sekuritisasi, isu lingkungan yang diangkat dan proses sekuritisasi.

1.6. Landasan Konseptual

1.6.1. Kerangka Teori dan Konsep

a. Teori Sekuritisasi

Pada awalnya, keamanan yang hanya berfokus pada isu militer yang dipengaruhi oleh pandangan realisme yang membahas tentang rudal, kapal tempur dan lainnya kemudian

dilihat oleh Buzan bahwa keamanan merupakan cabang dari politik. Buzan mengemukakan isu keamanan memiliki kebutuhan dalam memperluas agenda keamanannya yang berpotensi menjadi ancaman di dalam lima aspek antara lain sektor militer, sektor politik, sektor ekonomi, sektor sosial, dan sektor lingkungan. Buzan menjelaskan bahwa Negara tidak lagi satu-satunya aktor yang terlibat dalam isu keamanan, melainkan berbagai aktor seperti organisasi internasional, *non-governmental organizations* (NGO), kelompok kepentingan, perusahaan multi-nasional dan trans-nasional, partai politik, kaum-kaum minoritas dan individu. Kemunculan teori sekuritisasi muncul atas kajian yang dipelopori oleh Barry Buzan, Ole Weaver dan beberapa pemikir yang dikelompokkan sebagai pemikir *Copenhagen School*. Kelompok ini kemudian menghasilkan beberapa pemikiran seperti hubungan antara keamanan kawasan dan global, *regional security complex theory (RSCT)*, *European security*, dan pemikiran yang dianggap paling berkontribusi adalah tentang *Societal Security* dan *Securitization* (Barry Buzan, 1998).

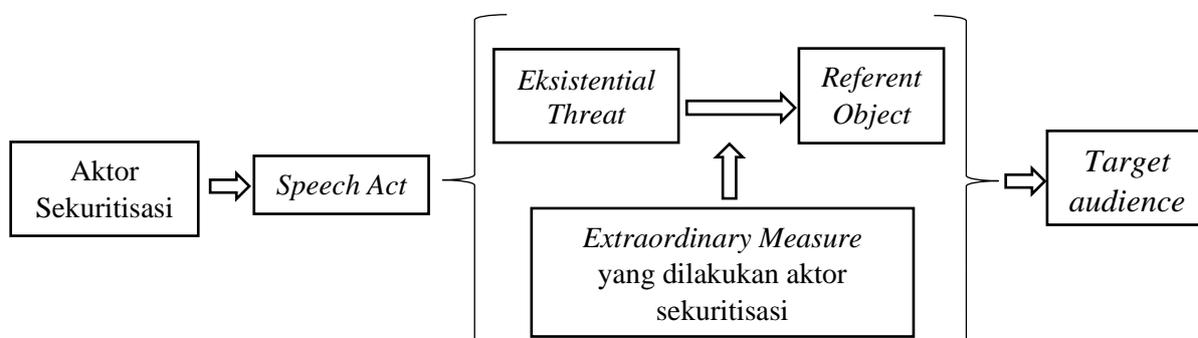
Sekuritisasi merupakan sebuah proses dalam mewujudkan keamanan. Dalam pandangan Weaver sekuritisasi merupakan sebuah upaya dalam mengangkat suatu isu yang sebelumnya tidak di perhitungkan menjadi isu penting yang berpengaruh dan berdampak besar terhadap keamanan. Sebuah isu dapat dikategorikan sebagai isu keamanan pada dasarnya isu tersebut dianggap penting dan dipandang mengancam secara nyata dan yang terjadi sehingga membutuhkan prioritas dalam penanganannya. Namun, isu keamanan juga muncul bukan hanya karena mengancam secara nyata, tetapi memang sengaja dimunculkan sebagai isu yang akan mengancam. Dalam teori sekuritisasi, isu yang semula tidak membutuhkan keputusan politik karena dianggap tidak penting, kemudian disuarakan oleh *securitizing actors* menjadi isu politik yang harus diselesaikan dengan keputusan politik atau kebijakan dan alokasi sumber daya karena isu tersebut menjadi isu penting dan genting dalam keamanan (Barry Buzan, 1998). Terdapat skema sekuritisasi Barry Buzan:



Inti teori sekuritisasi dalam kajian hubungan internasional adalah masalah keamanan bukan hanya berfokus kepada ancaman militer atau ancaman untuk negara, tetapi masalah keamanan dapat ditafsirkan sebagai ancaman karena adanya aktor yang mendefinisikannya. Aktor tersebut kemudian merasa mampu untuk menangani masalah tersebut untuk menjamin keselamatan objek yang terancam dan dianggap sebagai isu keamanan. Keberhasilan proses sekuritisasi ini sangat ditentukan oleh argumentasi atau *speech act* yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi dan seberapa besar argumentasi tersebut diterima oleh *audience* yang menjadi target.

Dalam pandangan Ozcan, terdapat indikator atau proses dalam sekuritisasi antara lain (1) adanya aktor sekuritisasi (2) *speech act* yaitu membingkai isu dalam keadaan terancam (*existential threat*) sehingga diperlukan urgensi untuk diselamatkan (3) *target audience* agar terpengaruh bahwa isu yang diangkat benar-benar terancam dan menjadi *referent object* dalam isu keamanan (4) *extraordinary measure* atau tindakan darurat yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi guna menyelamatkan *referent object* dalam isu keamanan (Özcan, 2013).

Adapun bagan indikator atau proses dalam sekuritisasi :



Proses sekuritisasi dapat dikatakan berhasil dengan melihat seberapa mampu aktor sekuritisasi dalam membingkai isu tersebut sehingga terbangun argumentasi bahwa terjadi

ancaman *referent object* dan meyakinkan *target audience* isu tersebut harus mendapat penanganan yang cepat dan darurat. Faktor terpenting dalam keberhasilan sekuritisasi adalah persetujuan atau semacam dukungan dari *target audience* atas dilakukannya suatu tindakan mendesak yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi dalam menyelamatkan *referent object* dari ancaman (Hadiwinata, 2017). Di samping itu adanya *extraordinary measure* atau tindakan darurat yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi penting dan di perlukan, namun bukanlah faktor terpenting dalam keberhasilan sekuritisasi. Sehingga, selama aktor sekuritisasi tidak melakukan tindakan mendesak dan cepat, namun melakukan *speech act* mendorong isu tersebut, selama *target audience* menyetujui tindakan tersebut, maka sekuritisasi dapat dikatakan berhasil (Özcan, 2013). Dalam keberhasilan sekuritisasi, terdapat tiga faktor yang mendukung keberhasilan sekuritisasi antara lain (1) Penggunaan bahasa yang tepat dalam *speech act* (2) Kekuatan sosial yang dimiliki oleh aktor sekuritisasi (3) Kemampuan aktor sekuritisasi dalam menjelaskan dan menyampaikan adanya ancaman serius terhadap *referent object* kepada *target audience* (Andika, 2013).

Sedangkan yang dimaksudkan *speech act* dalam sekuritisasi adalah seluruh tindakan yang dilakukan oleh *securitizing actors* dalam menginisiasi proses sekuritisasi. Ancaman serius dalam *speech act* dimunculkan atas wacana yang disuarakan oleh *securitizing actors* yang dianggap mengancam apa yang disebut sebagai *referent object* dalam konteks keamanan. *Target audience* yang dimaksud dalam proses sekuritisasi adalah pihak yang menjadi sasaran *speech act* dengan tujuan dipengaruhi dan mempercayai adanya ancaman serius terhadap *referent object* yang dilakukan oleh *securitizing actors* (Ramadhannanda, 2017).

Dalam proses menyampaikan *speech act*, diperlukan adanya pembeda antara *referent object*, *Securitizing actors* maupun *Functional actors*. Bagi negara yang menjadi *referent object* adalah kedaulatan dan bagi bangsa adalah identitas. Namun *referent object* saat ini

tidak hanya sebatas negara ataupun bangsa saja, namun semua isu tersebut dianggap penting dan dipandang mengancam secara nyata dan yang terjadi sehingga membutuhkan prioritas dalam penanganannya. Namun, isu keamanan juga muncul bukan hanya karena mengancam secara nyata, tetapi memang sengaja dimunculkan sebagai isu yang akan mengancam. Artinya, sebuah *referent object* bisa dibangun karena adanya aktor yang memunculkan segala sesuatu yang menjadi isu keamanan ke *target audience*. *Securitizing actors* adalah seseorang ataupun kelompok yang memunculkan sebuah isu menjadi *referent object*. Aktor bisa berasal berbagai pihak baik negara, NGO, partai politik, perusahaan, bahkan masyarakat secara individu yang mempunyai kekuatan sosial dalam melakukan sekuritisasi. *Functional actors*: dianggap sebagai aktor pendukung yang terikat dengan isu yang dimunculkan pada sektor tertentu sehingga tidak mengambil peran *securitizing actors* maupun sebagai *referent object*. (Barry Buzan, 1998). Berdasarkan beberapa variabel-variabel diatas, peneliti kemudian menyederhanakan indikator dalam sekuritisasi yang akan dipakai dalam penulisan penelitian ini antara lain (1) *Securitizing actors* (2) *Speech act* membingkai isu sebagai *reference object* (3) *Existential threat* (4) *Target audience* atau pihak yang diyakinkan (5) *Extraordinary measure* atau tindakan darurat dan (6) Hasil sekuritisasi.

b. Konsep Non Government Organization (NGO)

Peran *non-governmental organization* (NGO) dalam ranah politik global dalam perkembangannya menjadi semakin signifikan terutama setelah Perang Dingin berakhir. NGO telah berkembang dalam hal jumlah, ukuran, maupun keragaman isu yang menjadi perhatiannya. Konsep NGO sendiri belum menemukan bentuk yang pasti dan masih terdapat perbedaan- perbedaan dalam pendefinisianya. Secara umum fokus maupun orientasi NGO dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukannya maupun cakupan NGO tersebut baik lokal, nasional, atau internasional. NGO hadir dalam mengatasi permasalahan

kemasyarakatan seperti hak asasi manusia, pengentasan kemiskinan, pembangunan pedesaan, kesetaraan gender, literasi, layanan kesehatan, pengembangan sosial, lingkungan dan isu lainnya yang berorientasi di satu atau banyak daerah. Berbagai metode yang diadopsi dari berbagai sumber telah digunakan oleh NGO dalam mewujudkan tujuan mereka, meskipun dalam perjalanannya memiliki cerita keberhasilan dan cerita kegagalan. Meskipun kebanyakan dari NGO sering kali memiliki interaksi dengan pemerintahan dalam menyampaikan tujuan mereka, namun posisi NGO tidak terkait dengan pemerintahan.

NGO dapat didefinisikan sebagai organisasi independen, non-partisan, non-profit yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari mereka yang termarginalkan (Tuijil, 1999). NGO merupakan kelompok masyarakat madani yang berperan sebagai nara hubung antara masyarakat dan pemerintah dengan melakukan agenda sosial. NGO hadir bertujuan untuk melayani *interest* masyarakat yang partikular dengan memfokuskan kepada upaya advokasi dan atau operasional kepada tujuan sosial, politik dan ekonomi. Berdasarkan aktivitas utamanya, NGO dapat dibagi ke dalam dua kategori yaitu operasional dan advokasi (Hildy Teegen, 2004). Operasional adalah NGO yang menyediakan barang dan jasa yang kritis bagi masyarakat yang membutuhkan sedangkan advokasi adalah NGO yang bekerja sebagai representasi dari masyarakat yang tidak memiliki suara atau akses untuk mempromosikan kepentingan mereka. Berbagai macam cara seperti lobi, berperan sebagai pakar ahli serta penasihat, mengadakan penelitian, mengadakan konferensi, memonitor dan mengekspos tindakan aktor lain, mengadakan pengadilan publik, membagikan informasi terhadap konstituen utama, membentuk agenda ataupun melakukan boikot sebagai beberapa langkah dalam melakukan advokasi (Hudson, 2002). Bank Dunia mendefinisikan NGO sebagai organisasi non profit yang bergerak untuk meringankan permasalahan sosial, memunculkan atau mempromosikan kepentingan orang tidak mampu, menyediakan layanan sosial, dan mengembangkan masyarakat. Secara luas, Asia Development Bank mendefinisikan NGO

dalam dua hal, tidak berbasis di pemerintah dan tidak diciptakan untuk mendapatkan keuntungan. NGO digambarkan sebagai serangkaian kelompok dari para aktivis pengawas dan lembaga bantuan, pengembangan dan kebijakan yang tidak mengejar kepentingan komersial melainkan kepentingan publik.

NGO lingkungan dalam perjalanannya menghadirkan pengaruh dan partisipasi dalam politik lingkungan global. NGO lingkungan memainkan peran dalam mengidentifikasi risiko, dalam menganalisis dampak lingkungan, merancang dan menerapkan langkah-langkah dalam menjalankan tujuan perlindungan lingkungan dengan mempertahankan posisi dan eksistensi baik dalam lingkaran publik maupun pengaruh politik. NGO lingkungan menjadi aktor dalam politik lingkungan mulai dari tingkat lokal sampai internasional. Ada beberapa faktor pengaruh kehadiran NGO dalam politik lingkungan global antara lain (Scott T. Young, 2012) :

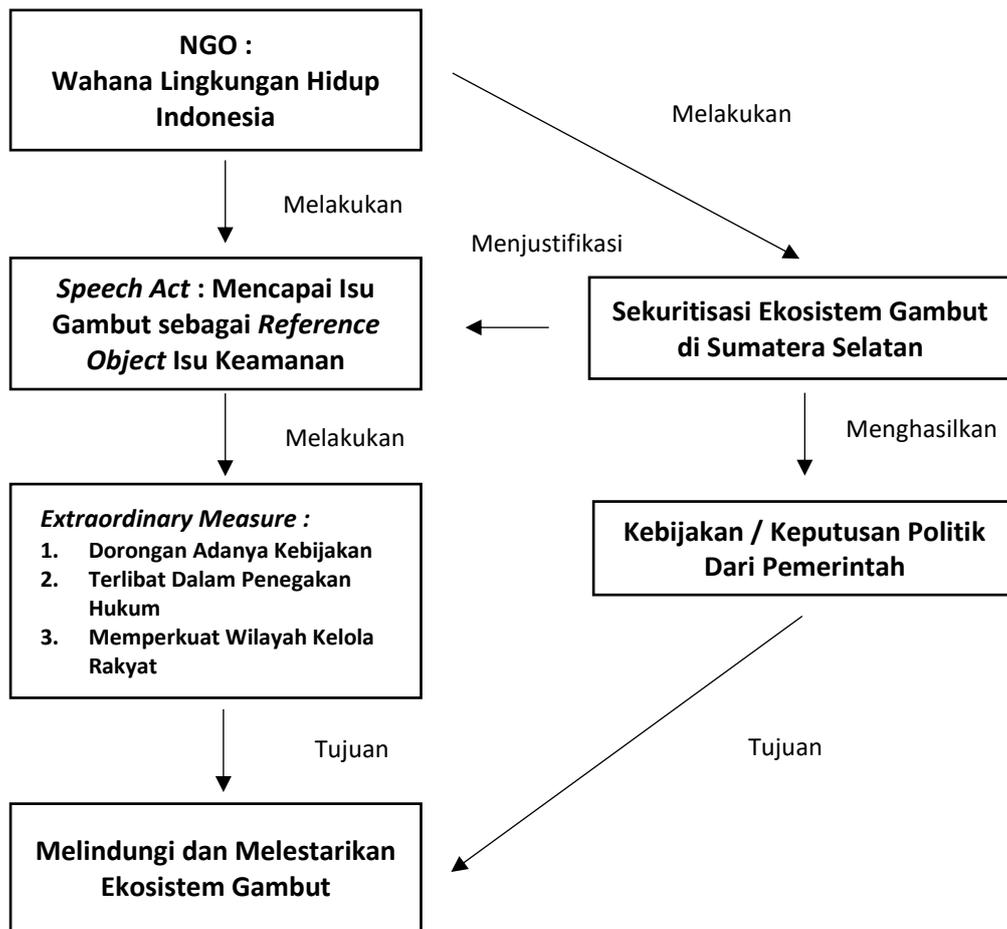
1. Kemampuan NGO dalam berinovasi karena memiliki pemikiran dan pengetahuan yang mendalam mengenai isu lingkungan.
2. NGO memiliki dedikasi terhadap lingkungan yang tinggi melebihi sektoral ataupun kepentingan nasional.
3. NGO dapat menarik perhatian dari pembuat kebijakan karena sering kali merepresentasikan konstituen dari dalam negaranya.

Terdapat dua perbedaan ideologis yang dianut para pegiat lingkungan yaitu hijau gelap dan hijau cerah. Penganut hijau gelap yang di pegang oleh NGO seperti Greenpeace dan FoEI menyuarakan adanya perubahan sosial dan radikal dalam menghadapi korporasi terutama yang dianggap merusak lingkungan. Sedangkan penganut hijau cerah yang dianut oleh CI dan EDF lebih memilih bekerja dalam sistem dan bergabung dengan kemitraan korporasi dalam memecahkan masalah lingkungan (Hoffman, 2012)

Berdasarkan Analisa jejaring sosialnya, Terdapat 5 kategori NGO lingkungan antara lain (Hoffman, 2012) :

1. NGO yang menolak bermitra dengan korporasi dan menjadi ideologi mereka bergerak dalam penolakan terhadap korporasi. Beberapa NGO lingkungan yang sejenis antara lain Greenpeace, Friend of The Earth, dan The Wildlife Society.
2. NGO yang menjadi mitra korporasi dan membangun jaringan secara sectoral. NGO ini mempunyai pengaruh besar dan bersifat pragmatis karena punya jejaring dengan korporasi maupun penguasa dalam pengambilan kebijakan. NGO lingkungan yang sejenis ini antara lain EDF, The Nature Conservancy, Natural Resources Defense Council (NRDC), World Resources Institute dan WWF.
3. NGO yang berperan sebagai penengah dalam perbedaan ideologi hijau gelap dan hijau cerah. NGO ini berfokus dalam isu tertentu seperti perubahan iklim berusaha mengumpulkan isu dan pemecahan sendiri namun tidak melepas relasi dengan perusahaan maupun penguasa.
4. NGO yang mengambil langkah melakukan kolaborasi dengan berbagai jaringan yang mereka miliki dan berbagai sektor.
5. NGO yang memiliki jaringan sektoral yang terbatas, namun masih berkaitan dengan perusahaan. NGO ini berfokus pada isu-isu spesifik dengan kelebihan kredibilitas yang bagus karena berfokus pada satu isu, namun rentan terhadap pengaruh dari pemangku kepentingan.

1.6.2. Alur Pemikiran



1.7. Argumentasi Utama

Sekritisasi ekosistem gambut Sumatera Selatan yang dilakukan oleh NGO : Wahana Lingkungan Hidup Indonesia adalah dengan melakukan justifikasi kondisi dan permasalahan ekosistem gambut di Sumatera Selatan. Kemudian melakukan advokasi kebijakan, terlibat dalam penegakan hukum dan melibatkan masyarakat untuk mencapai perlindungan ekosistem gambut di Sumatera Selatan.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Desain Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian eksplorasi-kualitatif yang digunakan untuk mengeksplorasi serta memahami

fenomena atau makna yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Proses penelitian kualitatif dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan, mengajukan pertanyaan maupun prosedur, pengumpulan data spesifik, menganalisis data secara induktif dan menarik kesimpulan dari data yang ada. Peneliti menggambarkan dan menyampaikan masalah secara cermat dan lengkap mengenai sekuritisasi ekosistem gambut Sumatera Selatan yang dilakukan oleh NGO: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.

1.8.2. Definisi Konsep

Penelitian ini memiliki beberapa definisi konsep antara lain :

- a. Sekuritisasi merupakan sebuah upaya dalam mengangkat suatu isu yang sebelumnya tidak di perhitungkan menjadi isu penting yang berpengaruh dan berdampak besar terhadap keamanan (Barry Buzan, 1998).
- b. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 55 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa. Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya (Gambut, 2020).
- c. NGO dapat didefinisikan sebagai organisasi independen, non-partisan, non-profit yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari mereka yang ter marginalkan (Tuijil, 1999).
- d. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau yang lebih dikenal sebagai WALHI, merupakan organisasi lingkungan hidup terbesar dan tertua di Indonesia. WALHI juga merupakan anggota dari Friend of The Earth

Internasional (FoEI) sebuah jaringan organisasi lingkungan hidup internasional di 74 negara (FoEI, 2020).

1.8.3. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian ditentukan berdasarkan hasil dari studi pendahuluan, referensi, pengalaman serta saran dari pembimbing atau orang yang dipandang ahli.

Tabel 1.2 Fokus Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator	Deskripsi
Sekuritisasi Ekosistem Gambut oleh NGO : Wahana Lingkungan Hidup Indonesia 2014-2016	Keamanan Lingkungan	1. Aktor sekuritisasi	a. Menjelaskan profil, sejarah dan ideologi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. b. Menjelaskan orang yang berperan di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia sebagai aktor sekuritisasi.
		2. <i>Speech Act</i>	a. Pentingnya ekosistem gambut bagi kehidupan b. Ketimpangan pengelolaan gambut di Sumatera Selatan c. Kerusakan gambut dan dampaknya bagi lingkungan dan masyarakat.
		3. <i>Existential Threat</i>	a. Kerusakan gambut di Sumatera Selatan
		4. <i>Target Audience</i>	a. Menjelaskan pihak yang diyakinkan yaitu pemerintah.
		5. <i>Extraordinary Measure</i>	a. Dorongan kebijakan kepada pemerintah terkait ekosistem gambut. b. Mendorong penegakan hukum terhadap perusak ekosistem gambut di Sumatera Selatan. c. Mendorong keterlibatan masyarakat dengan memperkuat wilayah kelola rakyat di ekosistem gambut.

		6. Hasil dari Sekuritisasi	a. Berupa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atas dorongan dari aktor sekuritisasi.
--	--	----------------------------	---

1.8.4. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini yaitu NGO: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Penetapan unit analisis ini didasari penelitian mengenai sekuritisasi ekosistem gambut Sumatera Selatan yang dilakukan oleh NGO: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.

1.8.5. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini merupakan jenis data kualitatif yang menjelaskan data-data yang didapatkan terkait dengan sekuritisasi ekosistem gambut Sumatera Selatan yang dilakukan oleh NGO: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam dengan para aktivis di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia yang terlibat sebagai aktor sekuritisasi dan data atau arsip resmi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal maupun media cetak atau online yang relevan dengan penelitian ini.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini :

- a. Metode Berbasis Observasi.

Metode ini digunakan dengan mendatangi langsung lokasi yang diteliti sebagai objek penelitian yaitu di Kantor Wahana Lingkungan Hidup Indonesia daerah Sumatera Selatan.

- b. Metode berbasis Dokumentasi.

Metode ini digunakan peneliti dalam mencari data-data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber berdasarkan pengamatan penulis.

- c. Metode berbasis Wawancara.

Metode ini digunakan dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dalam hal ini Manajer Kampanye Pangan, Air, dan Ekosistem Esensial WALHI yaitu Wahyu Pradana dan Direktur Eksekutif WALHI Daerah Sumatera Selatan yaitu M. Hairul Sobri.

1.8.7. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini, peneliti menguraikan informan ke dalam tiga macam informan yaitu informan kunci, informan kunci, dan informan pendukung. Informan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Informan Kunci dalam hal ini adalah Nurhidayati selaku Direktur Eksekutif Nasional WALHI.
- b. Informan utama dalam hal ini adalah Wahyu Pradana selaku Manajer Kampanye Pangan, Air dan Ekosistem Esensial M. Hairul Sobri selaku Direktur Eksekutif Daerah Sumatera Selatan 2018-2022.
- c. Informan pendukung dalam hal ini adalah staf lainnya yang terlibat dalam tema penelitian ini.

1.8.8. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi data. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan

memanfaatkan suatu yang berbeda dan dari berbagai sumber melalui cara dan waktu yang beragam. Menurut Densin dan Moelong, terdapat empat jenis triangulasi antara lain triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi teknik dan triangulasi teori. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menguji kredibilitas data dengan mengecek data dari berbagai sumber. Triangulasi metode adalah pengecekan keabsahan data dengan pengecekan tingkat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan sumber data dengan metode yang sama.

1.8.9. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan menurut Miles dan Huberman yaitu :

- a. Pengumpulan data yaitu aktivitas mengumpulkan data yang telah didapatkan dengan beberapa metode seperti metode berbasis Internet, dokumentasi, serta wawancara yang dipandang dapat mendukung penelitian penulis.
- b. Reduksi data yaitu proses pemilihan kembali teori serta konsep yang berhubungan dengan hasil penelitian yang sudah dilalui.
- c. Penyajian atau penampilan data merupakan hasil dari reduksi data yang ditampilkan sedemikian rupa agar pembaca bisa memahami hasil – hasil data yang telah penulis dapatkan.
- d. Penarikan kesimpulan setelah adanya data – data serta temuan penelitian maka akan ditarik kesimpulannya, sehingga dalam hal ini penarikan kesimpulan ini diperlukan verifikasi sebelum akhirnya finalisasi kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, F., & Subiksa, I. M. (2008). *Lahan Gambut: Potensi untuk Pertanian dan Aspek Lingkungan*. Bogor: Balai Penelitian Tanah dan World Agroforestry Centre (ICRAF).
- Akuntono, I. (2016, January 13). *Presiden Jokowi Bentuk Badan Restorasi Gambut*. Diambil kembali dari nasional.kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2016/01/13/18312831/Presiden.Jokowi.Bentuk.Badan.Restorasi.Gambut>.
- Andika, W. (2013). Amandemen Pasal 9 Konstitusi Jepang: Mungkinkah Berhasil Dilakukan? *Jurnal Hubungan Internasional Vol. 2, No. 1*, 1-6.
- Anggara, A. S. (2018). Aspek Hukum Pelestarian Lahan Basah pada Situs Ramsar di Indonesia (Studi terhadap Implementasi Konvensi Ramsar 1971 di Taman Nasional Tanjung Puting). *Mimbar Hukum UGM Vol.30 No.2*, 252.
- Barry Buzan, e. (1998). *Security A New Framework for Analysis*. London: Lynne Rienner Publishe.
- Barthelmes, A., Couwenberg, J., Risager, M., Tegetmeyer, C., & Joosten, H. (2015). *Peatlands and Climate in a Ramsar context : A Nordic-Baltic Perspective*. Denmark: Nordic Council of Ministers.
- Chin, S. Y., & Parish, F. (2013). *Peatlands: Status, challenges and actions in Southeast Asia*. Asean Biodiversity.
- Cifor. (2020, Juni 18). *Country Rank by Peatland*. Diambil kembali dari cifor.org: <https://www.cifor.org/global-wetlands/>
- FoEI. (2020, June 22). *Indonesia: Friends of The Earth Indonesia*. Diambil kembali dari Friends of The Earth International: <https://www.foei.org/member-groups/asia-pacific/indonesia>
- Friend of the Earth. (2020, August 9). *About Us*. Diambil kembali dari Friend of the Earth: <https://foe.org/about-us/>
- Gambut, P. (2020, Juni 20). *Lahan Gambut Menjaga Perubahan Iklim*. Diambil kembali dari Pantaugambut.id: <https://www.pantaugambut.id/pelajari/peran-penting-lahan-gambut/lahan-gambut-menjaga-perubahan-iklim>
- Giesen, W. (2006). Berbak Wildlife Reserve. Dalam K. K. Nasional, *Strategi dan Rencana Tindak Nasional Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan* (hal. 12). Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Group, W. B. (2016, February). *Kerugian dari Kebakaran Hutan : Analisa Dampak Ekonomi dari Krisis Kebakaran tahun 2015*. Diambil kembali dari openknowledge.worldbank.org: <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/23840/Forest%20Fir>

e%20Notes%20-
%20Bahasa%20final%20april%202018.pdf?sequence=6&isAllowed=y

- Hadiwinata, B. S. (2017). *Studi dan Teori Hubungan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Hardjowigeno, S. (1986). *Sumber daya fisik wilayah dan tata guna lahan : Histosol*. Bogor: Fakultas Pertanian IPB.
- Harenda, K. M., Lamentowicz, M., Samson, M., & Chojnicki, B. H. (2018). The Role of Peatlands and Their Carbon Storage Function in the Context of Climate Change. *Interdisciplinary Approaches for Sustainable Development Goals, GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences*, 170.
- Hazliansyah. (2014, October 26). *Walhi Desak Pemerintah Revisi PP Gambut*. Diambil kembali dari nasional.republika.co.id:
<https://nasional.republika.co.id/berita/ne0vx2/walhi-desak-pemerintah-revisi-pp-gambut>
- Hildy Teegen, J. P. (2004). The Importance of Non Governmental Organizations (NGOs) in Global Government and Value Reaction : An International Business Research Agenda. *Journal of International Business Studies*, 463-465.
- Hoffman, A. (2012). Sustainability: Essentials for Business. Dalam K. K. Scott T. Young, *Role of Governments* (hal. 232). SAGE Publications.
- Hudson, A. (2002). Advocacy by UK-Based Development NGOs. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 402-418.
- Hugelius, G. (2020, August 19). *Why the world's peatlands are key to stopping climate change*. Diambil kembali dari World Economic Forum:
<https://www.weforum.org/agenda/2020/08/peatlands-climate-change-environment-global-temperatures/>
- Hulme. (2005). Adapting to climate change: is there scope for ecological management in the face of a global threat? *J Appl Ecol*, 784-794.
- Irawan, Y. K. (2016, December 6). *Pemerintah Terbitkan Revisi PP Perlindungan Gambut*. Diambil kembali dari nasional.kompas.com:
<https://nasional.kompas.com/read/2016/12/06/11592021/pemerintah.terbitkan.revisi.pp.perlindungan.gambut?page=all#:~:text=Inti%20dari%20revisi%20PP%20tersebut,ekosistem%20gambut%20untuk%20tanaman%20tertentu>.
- J.Charman, D., K.Booth, R., Mäkilä, M., & Sirin, A. (2007). *Assessment on Peatlands, Biodiversity, and Climate change*. Kuala Lumpur: Global Environment Centre and Wetlands International.
- Joosten, H. (2009). *The Global Peatland CO2 Peatland status and emissions in all countries of the world*. Ede: Wetlands International.
- KLHK. (2018). *Corrective Action Tata Kelola Gambut di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

- Linggasari, Y. (2015, October 21). *Pemerintah: Kebakaran Hutan Tahun Ini Lebih Parah dari 1997*. Diambil kembali dari CNN Indonesia:
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151021155255-20-86387/pemerintah-kebakaran-hutan-tahun-ini-lebih-parah-dari-1997>
- Murdiyarso, D., & Suryadiputra, I. (2001). *Perubahan Iklim dan Peranan Lahan Gambut*. Diambil kembali dari wetland.or.id: The Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
- Nando, D. A. (2018, February 21). *Ekosistem Gambut di Desa Belanti: Wilayah Budidaya, tapi Tak Bisa Diolah*. Diambil kembali dari pantaugambut.id:
<https://www.pantaugambut.id/cerita/ekosistem-gambut-di-desa-belanti-wilayah-budidaya-tapi-tak-bisa-diolah>
- Nasional, K. K. (2006). *Strategi dan Rencana Tindak Nasional Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Nugraha, I. (2015, October 6). *Walhi: Berikut Korporasi-korporasi di Balik Kebakaran Hutan dan Lahan Itu*. Diambil kembali dari Mongabay:
<https://www.mongabay.co.id/2015/10/06/berikut-korporasi-korporasi-di-balik-kebakaran-hutan-dan-lahan-itu/>
- Nugroho, B. P. (2015, September 6). *Jokowi akan Cabut Izin dan Pidanakan Perusahaan Pembakar Hutan*. Diambil kembali dari news.detik.com:
<https://news.detik.com/berita/d-3011382/jokowi-akan-cabut-izin-dan-pidanakan-perusahaan-pembakar-hutan>
- Özcan, S. (2013). Securitization of Energy through the lenses of Copenhagen School. *Orlando International Conference, 21-23 March, 2013, West East Institute* (hal. 9). Orlando: The 2013 WEI International Academic Conference Proceedings .
- Page, S. E., Banks, C. J., & Rieley, J. O. (2008). Tropical peatlands: Distribution, extent and carbon storage-uncertainties and knowledge gaps. 2.
- Pradana, W. (2020, October 27). Sekuritisasi Ekosistem Gambut Sumatera Selatan bersama Manager Kampanye Ekologi Esensial WALHI. (W. Saputra, Pewawancara)
- Pramudianto, A. (1994). Kawasan Lahan Basah dalam Konsep Hukum Global dan Keberadaannya di Indonesia. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Vol.14, No.1, 2*.
- Putusan Banding Perbuatan Melawan Hukum Karhutla Gambut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melawan PT. Bumi Mekar Hijau, 51/PDT/2016/PT.PLG (Pengadilan Tinggi Palembang August 12, 2016).
- Putusan Perbuatan Melawan Hukum Karhutla Gambut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melawan PT. Bumi Mekar Hijau, 24/Pdt.G/2015/PN.Plg (Pengadilan Negeri Palembang December 30, 2015).

- Quere, C. L., Hawtin, N., & Vuuren, D. V. (2018). *Global Carbon Budget 2018*. Diambil kembali dari Global Carbon Project: <http://globalcarbonproject.org/carbonbudget/index.htm>.
- R.Cris, Buckmaster, C.Bain, & M.Reed. (2017, November). *Peatlands and Climate Change*. Diambil kembali dari International Union for Conservation of Nature issues brief: https://www.iucn.org/sites/dev/files/peatlands_and_climate_change_issues_brief_final.pdf
- Ramadhannanda, K. (2017). Kegagalan Bantuan USAID untuk Ethiopia dalam Program “Villagization” (2010-2014). *Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Ramadhan, M. (2017). Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Restorasi Lahan Gambut di Kalimantan Tengah. *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan IPB*, 62.
- Ramsar. (2016). *An Introduction to the Ramsar Convention on Wetlands*. Switzerland: Ramsar Convention Secretariat.
- Rosalina, U., Hairiah, K., Muslihat, L., Suryadiputra, I., Jaya, A., & Murdiyarso, D. (2004). *Petunjuk Lapangan Pendugaan cadangan Karbon pada lahan gambut*. Bogor: Wetland International - Indonesian Programme.
- Saputra, A. (2015, September 15). *Inpres Jokowi Jauh-jauh Hari, Mengapa Masih Ada Kebakaran Hutan Lagi?* Diambil kembali dari news.detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-3018955/inpres-jokowi-jauh-jauh-hari-mengapa-masih-ada-kebakaran-hutan-lagi>
- Saturi, S. (2012, November 26). *Pabrik Pulp Raksasa di Sumsel Bahayakan Hutan Alam Sekitar*. Diambil kembali dari mongabay.co.id: <https://www.mongabay.co.id/2012/11/26/pabrik-pulp-mills-raksasa-di-sumsel-bahayakan-hutan-alam-sekitar/>
- Saturi, S. (2015, May 20). *Perpanjangan Tanpa Penguatan, Inilah Kelemahan Inpres Moratorium Izin Hutan*. Diambil kembali dari Mongabay.co.id: <https://www.mongabay.co.id/2015/05/20/perpanjangan-tanpa-penguatan-inilah-kelemahan-inpres-moratorium-izin-hutan/>
- Sayyidati, A. (2016). Isu Pemanasan Global dalam Pergeseran Paradigma Keamanan pada Studi Hubungan Internasional . *Jurnal Hubungan Internasional IDF*, 7.
- Scott T. Young, K. K. (2012). Role of Governments and Non Governmental Organizations. Dalam K. K. Scott T. Young, *Sustainability: Essentials for Business* (hal. 231). SAGE Publications.
- Setyorini, V. P. (2016, December 6). *PP 57/2016 berlakukan moratorium lahan gambut*. Diambil kembali dari antaranews.com: <https://www.antaranews.com/berita/600042/pp-57-2016-berlakukan-moratorium-lahan-gambut>

- Sipongi. (2020). *Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Per Provinsi Di Indonesia Tahun 2015-2020*. Diambil kembali dari sipongi.menlhk.go.id: http://sipongi.menlhk.go.id/pdf/luas_kebakaran
- Sobri, M. H. (2020, October 22). Sekuritisasi Ekosistem Gambut Sumatera Selatan bersama Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sumatera Selatan. *Wawancara Pribadi*. (W. Saputra, Pewawancara)
- Sorensen, R. J. (2009). *Pengantar Studi Ilmu Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sukarman. (2014). *Pembentukan, Sebaran, dan Kesesuaian Lahan Gambut di Indonesia*. Bogor: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian.
- Suryarandika, R. (2020, October 23). *Walhi: Lokasi Karhulta Selalu Sama Tiap Tahun di Sumsel*. Diambil kembali dari nasional.republika.co.id: <https://nasional.republika.co.id/berita/pzcwb5382/walhi-lokasi-karhulta-selalu-sama-tiap-tahun-di-sumsel>
- Trinirmalaningrum, Dalidjo, N., & Siahaan, F. R. (2015). *Dibalik Tragedi Asap : Catatan Kebakaran Hutan dan Lahan tahun 2015*. Jakarta: The Asia Foundation.
- Triyono, A., & Vebri, H. (2015, October 29). *Cegah kebakaran, izin konsesi lahan gambut distop*. Diambil kembali dari Kontan.co.id: <https://fokus.kontan.co.id/news/cegah-kebakaran-izin-konsesi-lahan-gambut-distop>
- Tuijil, P. V. (1999). NGO's and Human Right : Sources Justice and Democracy. *Journal of International Affrair*, 495.
- Utomo, Y. W. (2015, September 14). *Kabut Asap Kebakaran Hutan, Setengah Abad Kita Abai*. Diambil kembali dari Kompas.com: <https://sains.kompas.com/read/2015/09/14/16272971/Kabut.Asap.Kebakaran.Hutan.Setengah.Abad.Kita.Abai?page=all>
- Wahyunto, S. R., & Subagjot, H. (2006). Sebaran Gambut dan Kandungan Karbon Pulau Sumatera dan Kalimantan. Dalam K. K. Nasional, *Strategi dan Rencana Tindak Nasional Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan* (hal. 10). Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- WALHI. (2016, October 23). *Hari Pangan Se-Dunia, Walhi dan masyarakat Sipil Deklarasikan Nusantara Menuju Desa Ekologis*. Diambil kembali dari walhisumsel.or.id: <https://walhisumsel.or.id/2016/10/23/hari-pangan-se-dunia-walhi-dan-masyarakat-sipil-deklarasikan-nusantara-menuju-desa-ekologis/>
- WALHI. (2016). *Kelola Rakyat atas Ekosistem Rawa Gambut : Pelajaran Ragam Potret dan Argumen Tanding*. Jakarta: WALHI.
- WALHI. (2020, November 1). *Sejarah*. Diambil kembali dari WALHI: <https://walhi.or.id/sejarah>
- WALHI. (2020, October 15). *Visi dan Misi*. Diambil kembali dari walhi.or.id: <https://www.walhi.or.id/visi-dan-misi>

- Wijaya, T. (2015, March 24). *Pegiat Lingkungan: Moratorium Perizinan Hutan dan Lahan Gambut Harus Dilanjutkan*. Diambil kembali dari mongabay.co.id:
<https://www.mongabay.co.id/2015/03/24/pegiat-lingkungan-moratorium-perizinan-hutan-dan-lahan-gambut-harus-dilanjutkan/>
- Wijaya, T. (2015, December 10). *Tidak hanya di Perkebunan dan HTI, Kebakaran di Sumsel juga Melanda Kawasan Koservasi*. Diambil kembali dari mongabay.co.id:
<https://www.mongabay.co.id/2015/12/10/tidak-hanya-di-perkebunan-dan-hti-kebakaran-di-sumsel-juga-melanda-kawasan-konservasi/>
- Wijaya, T. (2016, May 1). *BRG: Kriteria Gambut yang Direstorasi di Sumatera Selatan, Bukan hanya Ketebalan*. Diambil kembali dari mongabay.co.id:
<https://www.mongabay.co.id/2016/05/01/brg-kriteria-gambut-yang-direstorasi-di-sumatera-selatan-bukan-hanya-ketebalan/>
- Wijaya, T. (2016, June 13). *Menata Lahan Gambut di Sumatera Selatan Butuh Konsolidasi Budaya*. Diambil kembali dari mongabay.co.id:
<https://www.mongabay.co.id/2016/06/13/menata-lahan-gambut-di-sumatera-selatan-butuh-konsolidasi-budaya/>
- Wijaya, T. (2016, January 6). *Tuntutan KLHK Terhadap PT. BMH di PN Palembang Dinilai Lemah Dukungan. Benarkah?* Diambil kembali dari mongabay.co.id:
<https://www.mongabay.co.id/2016/01/06/tuntutan-klhk-terhadap-pt-bmh-di-pn-palembang-dinilai-lemah-dukungan-benarkah/>
- Wijaya, T. (2020, October 6). *Penanganan Gambut di Sumatera Selatan Butuh Komitmen Para Pihak*. Diambil kembali dari mongabay.co.id:
<https://www.mongabay.co.id/2020/10/06/penanganan-gambut-di-sumatera-selatan-butuh-komitmen-para-pihak/>
- Wijaya, T., Fachrizal, A., Karokaro, A. S., & Diana, E. (2014, November 3). *Dari Daerah Sikapi PP Gambut, Apa Kata Mereka?* Diambil kembali dari mongabay.co.id:
<https://www.mongabay.co.id/2014/11/03/dari-daerah-sikapi-pp-gambut-apa-kata-mereka/>
- World Bank Group. (2015, November 25). *Krisis Kebakaran dan Asap Indonesia*. Diambil kembali dari worldbank.org:
<https://www.worldbank.org/in/news/feature/2015/12/01/indonesias-fire-and-haze-crisis>